

**PENGARUH PARTISIPASI PIMPINAN DAN IMPLEMENTASI STANDAR
AKUNTANSI PEMERINTAHAN TERHADAP KINERJA KEUANGAN
(Studi pada SKPD Provinsi Bengkulu)**

Umi Fajri Ramadanti

Program Magister Akuntansi Universitas Bengkulu

**Willy Abdillah
Robinson**

Fakultas Ekonomi Universitas Bengkulu

ABSTRACT

This study aimed to measure the effect of participation and leadership on the financial performance of SAP Implementation at Regional Working Units (on education) Bengkulu province. As for the number of samples in this study consisted of 86 respondents, where the questionnaire distributed to all SKPDs Bengkulu Provincial Government, to test the validity and Reliability of.

Based on the results of multiple linear regression calculation on the first hypothesis, variable leadership participation a positive and significant effect on the financial performance. In the second hypothesis, the variable implementation for SAP (Government Accounting Standards) is also positive and significant effect on performance, so that the second hypothesis is accepted. Thus, Participation and leadership of SAP Implementation (Government Accounting Standards) positive and significant effect on the financial performance in the regional work units Bengkulu Provincial Government.

Keywords: Leadership Participation, SAP Implementation, and Financial Performance

1. PENDAHULUAN

Di setiap negara membutuhkan pemerintahan yang baik atau yang sering disebut *Good Government*. Pemerintahan yang baik, merupakan suatu bentuk keberhasilan dalam menjalankan tugas untuk membangun negara sesuai dengan tujuan yang telah direncanakan. Untuk pencapaian tujuan tersebut setiap pemerintahan harus dapat mengelola sumber daya yang ada, terutama dalam kaitannya dengan keuangan. Keuangan negara atau daerah menurut Undang-Undang RI no. 17 Tahun 2003 adalah semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu baik berupa uang ataupun barang yang dapat dijadikan milik negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Lalu hak dan kewajiban dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus di masukan dalam APBD.

Dalam rangka pertanggung jawaban pelaksanaan APBD, kepala SKPD selaku pengguna anggaran diharuskan menyelenggarakan sistem akuntansi atas transaksi keuangan, aset, utang, dan ekuitas dana yang berada dalam tanggung jawabnya. Pencatatan atas transaksi tersebut sebagai bahan dalam menyiapkan laporan keuangan SKPD, laporan keuangan SKPD terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan yang harus disampaikan kepada Kepala Daerah melalui PPKD selambat-lambatnya dua bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). SAP merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Dengan demikian, SAP

merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia.

Dalam upaya pertanggung jawaban SKPD tersebut sebagai tolak ukur gambaran kinerja keuangan suatu SKPD, disinilah pimpinan dalam hal ini adalah Kepala SKPD selaku kuasa pengguna anggaran serta Kepala Bagian atau Kepala sub-sub bagian yang menangani masalah keuangan memiliki peranan dalam upaya meningkatkan kinerja keuangan. Peran pimpinan dalam segala situasi organisasi merupakan suatu faktor yang sangat strategis. Sampai saat ini penelitian banyak dilakukan oleh ilmuwan sebagai salah satu upaya peningkatan efisiensi, dan efektifitas kerja organisasi. Pimpinan harus dapat mengelola pola pikir pegawainya untuk menaati dan melaksanakan setiap pekerjaan sesuai dengan norma dan aturan yang berlaku. Pimpinan harus dapat menyampaikan visi dan misi organisasi secara persuasif dengan bahasa yang mudah dipahami dan dimengerti agar kinerjanya meningkat. Robbins (2003) menyatakan bahwa keberhasilan suatu organisasi dalam pencapaian tujuan melalui usaha menggerakkan orang lain dalam organisasi atau instansi tidak terlepas dari kapasitas, peranan, perilaku dan karakteristik seorang pimpinan. Karakteristik seorang pimpinan meliputi sifat kepemimpinan, fungsi kepemimpinan, faktor-faktor pembatasan kepemimpinan, tindakan pengambilan keputusan, dan partisipasi dalam pengambilan keputusan. Proses birokrasi pemerintahan menuntut pimpinan sebagai pejabat struktural yang selalu berupaya untuk meningkatkan prestasi kerja dan kinerja dalam pemerintahan.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 tahun 2006 sebagaimana yang sudah direvisi oleh Permendagri Nomor 59 tahun 2007, pemerintah daerah dipimpin oleh seorang kepala daerah yang merupakan pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan. Apabila Kepala Daerah beserta perangkat pemerintahannya dalam hal ini termasuk Kepala SKPD selaku pimpinan dalam setiap SKPD dan Kepala bagian keuangan yang menangani masalah keuangan dalam SKPD, dapat menjalankan fungsi dan wewenang tersebut bukan tidak mungkin meningkatnya kinerja keuangan dapat terwujud. Menurut Solikin (2006) kinerja keuangan yaitu kinerja kegiatan operasional yang berdimensi keuangan. Menurut Abdullah (2011) penilaian kinerja keuangan pemerintah daerah (Pemda) sangat berbeda dengan penilaian kinerja keuangan perusahaan, dimana pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangannya berbasis anggaran. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) adalah merupakan lembaga pemerintah yang memiliki kewajiban untuk membuat laporan keuangan untuk mempertanggungjawabkan aktivitas yang telah dilakukan Pemerintah Provinsi Bengkulu merupakan lembaga pemerintah yang berkewajiban dalam melakukan penilaian kinerja organisasi publik secara baik.

Pemerintah Provinsi Bengkulu juga terus berupaya untuk dapat terus meningkatkan kinerja pemerintahannya, namun dalam pelaksanaannya tetap saja masih mengalami hambatan-hambatan, baik itu dari segi kepemimpinan maupun pengelolaan keuangan. Berbagai permasalahan dalam pengelolaan keuangan daerah adalah masih banyak entitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang belum tertib dalam pengelolaan dan penyajian atau kewajiban laporan keuangannya. Tidak dipenuhinya batas waktu penyusunan, dan penyampaiannya ke BPK untuk diperiksa disebabkan kemampuan pemerintah daerah untuk menyusun LKPD sangat terbatas. (<http://www.slideshare.net>) Adanya permasalahan-permasalahan tersebut, diduga disebabkan lemahnya keterlibatan pimpinan atau pejabat penatausahaan keuangan untuk memahami dan memperbaharui penyusunan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah yang tertuang pada Standar Akuntansi Pemerintahan yang berlaku. Kurangnya partisipasi dari pimpinan baik itu dari segi pengawasan, dan pemahaman yang baku, maka hasil yang akan dicapai tidak akan maksimal, hal ini tentunya mempengaruhi kinerja keuangan.

Dengan demikian, dugaan sementara tingkat partisipasi pimpinan dan implementasi SAP akan berpengaruh pada kinerja keuangan yang ada. Dari berbagai permasalahan diatas

menarik peneliti untuk melakukan penelitian yang berjudul “ *Pengaruh Partisipasi Pimpinan dan Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah terhadap Kinerja Keuangan (Studi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Provinsi Bengkulu)*”.

Adapun tujuan daripada penelitian ini adalah; Untuk mengukur pengaruh Partisipasi a) Pimpinan terhadap kinerja keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Provinsi Bengkulu. b) Untuk mengukur pengaruh Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah terhadap kinerja keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Provinsi Bengkulu.

LANDASAN TEORI

Partisipasi Pimpinan

Partisipasi adalah keterlibatan seseorang dalam situasi baik secara mental pikiran atau emosi dan perasaan yang mendorongnya untuk memberikan sumbangan dalam usaha mencapai tujuan yang telah ditentukan dan ikut bertanggungjawab terhadap kegiatan pencapaian tujuan tersebut. (Syamsuddin Adam dalam Prasetya, 2008. Sedangkan pimpinan diartikan sebagai seseorang yang aktif membuat rencana - rencana, mengkoordinasi, melakukan percobaan dan memimpin pekerjaan untuk mencapai tujuan bersama-sama (Anogara, 2003) Menurut Stonen dalam Moejiono (2002), pimpinan adalah seseorang yang bertanggung jawab untuk bekerja dengan orang lain, salah satu dengan atasannya, staf, teman sekerja atau atasan lain dalam organisasi sebaik orang diluar organisasi. Pimpinan merupakan seseorang pemikir yang analitis dan konseptual. Selanjutnya dapat mengidentifikasi masalah dengan akurat. Pimpinan harus dapat menguraikan seluruh pekerjaan menjadi lebih jelas dan kaitannya dengan pekerjaan lain.

Istilah partisipasi pimpinan digunakan dalam berbagai literatur untuk menggambarkan peran pimpinan dalam pelaksanaan kegiatannya. Barki dan Hartwick (1989) dalam Jarvenpaa dan Iven (1991) menjelaskan bahwa dukungan manajemen puncak salah satunya adalah partisipasi (*participation*) dimana partisipasi merupakan perilaku manajemen puncak atau aktivitas yang dilakukan selama proses perencanaan, pengembangan dan implementasi. Partisipasi dapat berbentuk pencurahan waktu dan energi (Jarvenpaa dan Ives, 1991). Dengan demikian berdasarkan pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa partisipasi pimpinan adalah keterlibatan seorang pimpinan untuk menyusun langkah, serta membuat keputusan mengenai tujuan operasi organisasi.

Implementasi SAP

Implementasi menurut Susilo (2007) adalah suatu penerapan ide, konsep, kebijakan atau inovasi dalam suatu tindakan praktis sehingga memberikan dampak, baik berupa pengetahuan, keterampilan maupun nilai dan sikap. Implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif (Setiawan, 2004). Pengertian lainnya dijelaskan bahwa Implementasi adalah “tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan” (Meter dan Horn dalam Wahab, 2006).

Hakikat utama implementasi kebijakan adalah memahami apa yang seharusnya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan. Pemahaman tersebut mencakup usaha-usaha untuk mengadministrasikannya dan menimbulkan dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian (Mazmanian dan Sabatier (1983) dalam Widodo, 2011). Berdasarkan beberapa definisi yang disampaikan para ahli di atas, disimpulkan bahwa implementasi merupakan suatu kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh pelaksana kebijakan dengan harapan akan memperoleh suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran dari suatu kebijakan itu sendiri. Sedangkan Standar akuntansi Pemerintah (SAP) berdasarkan PP nomor 24 Tahun 2005 adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan

dalam menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Pemerintah. Dimana SAP terdiri atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan akuntansi pemerintahan, serta peningkatan kualitas LKPP dan LKPD. Dengan demikian implementasi Standar Akuntansi Pemerintah diartikan sebagai penerapan atau usaha yang dilakukan pelaksana kebijakan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah yang sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi.

Kinerja Keuangan

Wirjatmi (2005) mengemukakan bahwa “Kinerja merupakan tingkat keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya”. Menurut Lembaga Administrasi Negara (2003) “Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan, program, kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, visi organisasi”. Sedangkan menurut Mahsun (2006) “Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang teruang dalam *strategic planning* suatu organisasi”. Disamping itu, menurut Sedarmayanti (2003) Kinerja (*performance*) diartikan sebagai hasil kerja seorang pekerja, sebuah proses manajemen atau suatu organisasi secara keseluruhan, dimana hasil kerja tersebut harus dapat diukur dengan dibandingkan standar yang telah ditentukan. Solikin (2006) menyatakan bahwa “Kinerja keuangan yaitu kinerja kegiatan operasional yang berdimensi keuangan”. Dengan demikian, dalam penelitian ini, istilah yang penulis maksudkan dengan kinerja keuangan adalah tingkat pencapaian dari suatu hasil kerja di bidang keuangan yang meliputi penerimaan dan pembelanjaan dengan menggunakan indikator keuangan yang ditetapkan melalui suatu kebijakan atau ketentuan perundang-undangan selama satu periode anggaran.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian verifikatif (*verificative research*) dan bersifat penjelas (*explanatory research*), karena penelitian ini bertujuan untuk melakukan verifikasi dan menjelaskan hubungan kausalitas antara berbagai variabel melalui pengujian hipotesis (Sekaran, 2007). Dari sisi pengumpulan data penelitian ini dapat disebut sebagai penelitian survei dan bersifat *grounded research*. Penelitian survei adalah metode pengumpulan data primer yang diperoleh secara langsung dari sumber asli, berupa penyebaran kuesioner yang diambil dari suatu sampel dalam sebuah populasi. Sedangkan *grounded research* adalah penelitian yang berdasarkan pada teori-teori yang sudah ada, kemudian dari teori-teori tersebut dikembangkanlah sebuah model penelitian untuk kemudian diuji secara empiris (Indriantoro dan Supomo, 1999).

Definisi Operasional

Untuk memudahkan dalam pengumpulan data dan pengukurannya, maka variabel-variabel penelitian ini dapat dioperasionalkan sebagai berikut:

Partisipasi Pimpinan

Partisipasi Pimpinan adalah keterlibatan seorang pimpinan untuk menyusun langkah, serta membuat keputusan mengenai tujuan operasi organisasi. Indikator pada partisipasi pimpinan dilihat dari peran atau serangkaian perilaku yang terorganisir yang diidentifikasi dengan suatu posisi, yaitu peran interpersonal, informasional, dan pengambilan keputusan (Mitzberg, 1973) dalam Rohman (2007).

Pada penelitian ini Instrumen penelitian berbentuk kuesioner, mengenai variabel partisipasi pimpinan. Dari variabel tersebut dibuat skala penilaian dengan rentang jawaban 1 sampai dengan 5. Masing-masing opsi jawaban diberi skor : A diberikan skor 5, B diberi skor 4, C diberi skor 3, D diberi skor 2, dan E diberi skor 1, dan instrumen dikembangkan

berdasarkan indikator yang ada diantaranya peran interpersonal, informasional, dan pengambilan keputusan. Sebelum digunakan dalam penilaian, instrumen tersebut diuji tingkat validitas dan reliabilitasnya. Butir-butir instrumen yang valid digunakan untuk alat pengukuran dalam penilaian, sedangkan butir yang instrumen yang tidak valid dibuang.

Implementasi SAP

Implementasi SAP adalah penerapan atau usaha yang dilakukan pelaksana kebijakan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah yang sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi. Adapun Instrumen penelitian yang digunakan pada variabel variabel implementasi SAP yaitu berbentuk kuesioner. Dari variabel tersebut dibuat skala penilaian dengan rentang jawaban 1 sampai dengan 5. Masing-masing opsi jawaban diberi skor : A diberikan skor 5, B diberi skor 4, C diberi skor 3, D diberi skor 2, dan E diberi skor 1, dan instrumen dikembangkan berdasarkan indikator yang ada.

Kinerja Keuangan

Kinerja Keuangan adalah tingkat pencapaian dari suatu hasil kerja di bidang keuangan yang meliputi penerimaan dan pembelanjaan dengan menggunakan indikator keuangan yang ditetapkan melalui suatu kebijakan atau ketentuan perundang-undangan selama satu periode anggaran. Indikator kinerja keuangan yang digunakan diantaranya; alokasi biaya (ekonomis dan efisiensi) dan kualitas pelayanan (efektifitas). Instrumen penelitian yang digunakan pada variabel kinerja keuangan adalah juga berbentukkuesioner. Variabel tersebut dibuat skala penilaian dengan rentang jawaban 1 sampai dengan 5. Masing-masing opsi jawaban diberi skor : A diberikan skor 5, B diberi skor 4, C diberi skor 3, D diberi skor 2, dan E diberi skor 1, dan instrumen dikembangkan berdasarkan indikator yang ada diantaranya kinerja keuangan yang digunakan diantaranya; alokasi biaya (ekonomis dan efisiensi) dan kualitas pelayanan (efektifitas).

Populasi dan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2004). Adapun populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu. Sementara sampel dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan *purposive sampling* yaitu pengambilan sampel berdasarkan kriteria tertentu yaitu pimpinan dan bendahara di tiap level unit kerja pada SKPD terpilih. Pimpinan dan Kabag/Kabid/Kasubbag yang menangani keuangan adalah individu-individu yang diasumsikan mewakili organisasi. Dengan demikian sampel pada penelitian mengenai pengaruh partisipasi pimpinan dan implementasi SAP terhadap kinerja keuangan di lingkungan SKPD Provinsi Bengkulu terdiri dari 43 SKPD sehingga sampel pada penelitian ini 86 orang responden.

Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner yang merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan atau pertanyaan tertulis responden untuk dijawab (Sugiyono, 2010).

Uji Validitas

Uji validitas digunakan agar data yang diperoleh dapat memberikan jawaban atas apa yang ingin diketahui dari suatu penelitian, sehingga dapat diketahui sejauh mana alat uji dapat mengukur apa yang sebenarnya ingin diuji (Cooper dan Schindler, 2003).

Untuk pengujian validitas dalam penelitian ini menggunakan *Confirmatory Factor Analysis*. Validitas konstruk pada prinsipnya digunakan untuk menguji data, yaitu proses untuk mendapatkan nilai valid yang sesuai dengan *rule of thumb*, yaitu sebesar,50 (Tjiptono dan Santoso, 2004).

Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas dilakukan untuk menguji keadaan suatu instrument pengukuran dalam penelitian. Informasi yang andal dapat menjadi informasi yang tahan uji karena apabila diuji ulang maka hasil pengujian tersebut akan tetap konsisten. Uji reliabilitas dilaksanakan setelah melakukan uji validitas terhadap item variabel yang valid saja dengan cronbach alpha diatas 0,60. Menurut Ghazali (2001) Uji Reliabilitas sebenarnya adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dinyatakan handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu

METODE ANALISIS

Analisis Deskriptif

Menurut Sugiyono (2010) Metode Analisis Deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi Tabel-tabel. Metode deskriptif akan menganalisis distribusi frekuensi, dan nilai modus.

Analisis Kuantitatif

Analisis kuantitatif adalah analisis yang digunakan untuk melakukan uji variabel dan reliabilitas serta analisis korelasi dan regresi linear berganda. Metode analisis kuantitatif yang digunakan dalam penelitian ini dianalisis dengan menggunakan program SPSS. Regresi linear berganda, digunakan untuk mengetahui pengaruh partisipasi pimpinan (X_1) dan implementasi SAP (X_2) terhadap kinerja keuangan (Y) dengan rumus :

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

Dimana :

a = Konstanta

b_1 = Koefisien variabel X_1

b_2 = Koefisien variabel X_2

X_1 = Variabel Partisipasi Pimpinan

X_2 = Variabel Implementasi SAP

Y = Variabel kinerja Keuangan

e = Standar error

Untuk mengukur besarnya pengaruh partisipasi pimpinan (X_1) dan implementasi SAP (X_2) terhadap kinerja (Y), digunakan alat analisis koefisien determinasi. Sementara itu, untuk mengukur besarnya pengaruh Partisipasi pimpinan (X_1) dan *implementasi SAP (X_2) terhadap kinerja (Y) baik secara parsial maupun secara simultan, digunakan uji signifikansi dengan taraf keyakinan 95% atau $\alpha = 0.05$

HASIL PENELITIAN

Tingkat pengembalian Kuesioner

Data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan cara mengantarkan langsung kuesioner yang dilakukan pada tanggal 1 Maret s/d 22 Maret 2013, dengan jumlah kuesioner yang dibagikan sebanyak 86 kuesioner. Dari 86 kuesioner yang dibagikan terdapat 78 kuesioner yang kembali dengan persentase (90,70%). Sementara itu, tingkat pengambilan kuesioner di

setiap satuan kerja dilakukan selama 2 minggu setelah kuesioner dibagikan. Kuesioner yang tidak kembali berjumlah 8 kuesioner, hal ini disebabkan responden yang tidak berada ditempat pada saat pengumpulan kuesioner.

Karakteristik Responden

Adapun karakteristik responden berdasarkan tingkat pendidikan, usia, dan masa kerja dari masing-masing pegawai yang ada akan diuraikan pada tabel selanjutnya. Komposisi Pegawai berdasarkan Tingkat Pendidikan S1 (74,4%) dan S2 (25,4%), Komposisi Pegawai berdasarkan Usia terlihat bahwa responden pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Bengkulu lebih didominasi oleh karyawan dengan usia antara diatas 40 tahun yaitu 48,72%, sedangkan usia tertinggi kedua adalah 36- 40 tahun yaitu 26,64%, selebihnya menyebar pada usia 31-35 yaitu 15,38 %, kemudian usia 26 – 30 tahun yaitu 10,26%. Komposisi responden berdasarkan masa kerja adalah dari 56 responden, mayoritas responden memiliki masa kerja 6-15 tahun yaitu terdiri dari 39 responden dengan tingkat persentase (50%), dan masa kerja selama 16-25 tahun terdapat 25 responden dengan tingkat persentase 32,1% sedangkan masa kerja 26-35 tahun berada pada urutan terakhir yaitu terdapat 14 responden dengan tingkat persentase 17,0%.

Statistik Deskriptif

Hasil pengukuran statistik deskriptif terhadap variabel dari 78 responden. Variabel Partisipasi Pimpinan terdiri dari 8 pertanyaan pada skala likert 5 poin. Dari 78 responden dihasilkan rentang aktual 17– 38, artinya tingkat Partisipasi pimpinan yang berada pada rentang 17 merupakan nilai terendah dari kisaran aktual sedangkan 38 merupakan nilai tertinggi dari partisipasi pimpinan. Rentang teoritis yang mungkin terjadi adalah antara 8 (menunjukkan nilai yang terendah) sampai 38 (menunjukkan nilai yang tertinggi). *Mean* untuk variabel partisipasi pimpinan menunjukkan *mean* sebesar 27.28 dengan standar deviasi 4.42904. Variabel implementasi SAP dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan 10 pertanyaan.

Dengan 78 responden dihasilkan rentang aktual 21-46, yang artinya Implementasi SAP berada direntang 21 yang merupakan nilai terendah dan 46 merupakan nilai tertinggi. Sedangkan kisaran teoritis terjadi antara 10 sampai 46. *Mean* menunjukkan nilai rata-rata sebesar 38.8718 dengan standar deviasi 5.49315. Sedangkan pada variabel kinerja keuangan diperoleh rentang teoritis 6 sampai 30, sedangkan rentang aktual yang terjadi sebesar 11 – 54 yang artinya kinerja keuangan berada pada rentang terendah 11 dan rentang tertinggi 54. Untuk *mean* menunjukkan nilai rata-rata 20.7821 dengan standar deviasi sebesar 3.47401. Secara keseluruhan nilai standar deviasi untuk variabel partisipasi pimpinan, implementasi SAP dan kinerja keuangan lebih kecil dari pada nilai rata-rata hal ini menunjukkan bahwa yang menjadi sampel pada penelitian ini tidak terlihat variasi yang sangat berarti.

Uji Kualitas Data

Uji Reliabilitas Data

Nilai reliabilitas untuk semua variabel yang diperoleh melalui perhitungan dengan rumus *Alpha Cronbach* adalah reliabel karena nilai *alpha cronbach* lebih besar dari 0,60, yaitu Partisipasi Pimpinan diperoleh 0,770, Implementasi SAP 0,769 dan Kinerja Keuangan 0,80.

Uji Validitas

Dari hasil analisis diperoleh nilai *Kaiser-Meyer Olkin Measure of Sampling Adequacy* pada Tabel KMO and *Bartlett's Test* pada variabel partisipasi pimpinan adalah sebesar 0,800. Implementasi SAP 0,761 dan variabel kinerja keuangan adalah sebesar 0,679 Hasil ini memperlihatkan bahwa instrumen ini valid karena KMO telah melebihi dari 0,5. Disamping itu, dilihat dari nilai *Bartlett's Test* pada variabel partisipasi pimpinan menunjukkan nilai

227,297, implementasi SAP 532,229 dan kinerja keuangan dengan nilai 272,992 dengan nilai signifikansi 0,000 sehingga dapat disimpulkan bahwa instrumen ini telah memenuhi syarat valid. Selanjutnya hasil korelasi melalui *anti image correlation* dari masing-masing faktor tersebut juga tergolong tinggi ($> 0,5$). Hasil pengujian analisis diketahui bahwa nilai korelasi masing-masing faktor pada setiap item pertanyaan adalah lebih besar dari 0,5 sehingga berdasarkan hasil pengujian validitas faktor dapat disimpulkan bahwa semua faktor adalah valid sebagai pembentuk variabel partisipasi pemimpin implementasi SAP dan Kinerja Keuangan.

Pengujian Hipotesis

Pada pengujian F digunakan untuk mengetahui apakah variabel-variabel independen secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Derajat kepercayaan yang digunakan adalah 0,05. Berdasarkan tabel diatas pada uji signifikansi simultan diperoleh nilai probabilitas (sig) = 0,000. Dengan nilai sig . lebih kecil dari nilai probabilitas 0,05 atau nilai $0,000 < 0,05$; maka berarti secara bersama-sama (simultan) partisipasi pimpinan dan implementasi SAP berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan. hasil uji regresi linier berganda, diperoleh nilai adjusted R Square sebesar 0,162 sehingga dapat disimpulkan bahwa partisipasi pimpinan dan implementasi SAP berpengaruh sebesar 16,2 % terhadap kinerja keuangan Keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Bengkulu. Sedangkan 83,8% dipengaruhi variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Berdasarkan hasil perhitungan regresi pada hipotesis pertama mengenai pengaruh variabel partisipasi pimpinan terhadap kinerja keuangan dapat dijelaskan bahwa variabel partisipasi pimpinan memiliki nilai koefisien regresi 0,231 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,006 maka berdasarkan hasil tersebut dapat diketahui bahwa Nilai sig lebih kecil dari nilai probabilitas 0,05, atau nilai $0,006 < 0,05$, maka **Hipotesis pertama diterima**.

Pada hipotesis kedua, berdasarkan hasil perhitungan regresi untuk variabel Implementasi SAP (Standar Akuntansi Pemerintah) memiliki nilai koefisien sebesar 0,183 dengan taraf signifikansi sebesar 0,007, sehingga diperoleh taraf signifikansi kurang dari 0,05. Koefisien regresi yang positif menunjukkan konsisten dengan hipotesis yang diharapkan untuk diterima dimana hipotesis tersebut menduga bahwa Implementasi SAP (Standar Akuntansi Pemerintah) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan sehingga **hipotesis kedua diterima**.

PEMBAHASAN

Pengaruh Partisipasi Pimpinan terhadap Kinerja keuangan

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel partisipasi pimpinan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan, sehingga hipotesis pertama diterima. Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi pimpinan yang dimiliki oleh pimpinan memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan. Koefisien regresi pada persamaan regresi pada model pertama dari variabel partisipasi pimpinan pada hipotesis pertama (H1) adalah positif dengan pengaruhnya yang signifikan. Berdasarkan koefisien regresi dari variabel partisipasi pimpinan yang signifikan tersebut maka dapat disimpulkan hipotesis pertama diterima. Dengan diterimanya hipotesis ini berarti bahwa partisipasi pimpinan dalam penelitian ini sudah mampu menjadi salah satu faktor yang dalam mempengaruhi kinerja keuangan khususnya di lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Bengkulu. Mengingat pentingnya partisipasi pimpinan dalam sebuah lembaga, maka diperlukan langkah-langkah khusus agar keterlibatan pimpinan menjadi lebih optimal seperti, meningkatkan kepedulian terhadap aktivitas kerja bawahan, memberikan ketegasan dalam menetapkan kebijakan dan peraturan di SKPD/unit kerja yang dipimpin, melakukan pengarahan secara spesifik, memantau proses pelaksanaan peningkatan pengelolaan keuangan dan mengevaluasi kegiatan pengelolaan keuangan.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nimphar (2008) yang menemukan bahwa partisipasi manajer dalam penyusunan anggaran berpengaruh terhadap kinerja. Demikian juga pada penelitian yang dilakukan oleh Jarvenpaa (1991) menemukan bahwa keterlibatan CEO eksekutif meningkatkan penggunaan sistem dalam perusahaan. Semakin tinggi keterlibatan dan partisipasi pimpinan akan meningkatkan penggunaan sistem di perusahaan yang mempengaruhi akan kinerja perusahaan.

Pengaruh Implementasi SAP (Standar Akuntansi Pemerintah) terhadap Kualitas Kinerja keuangan

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel implementasi SAP (Standar Akuntansi Pemerintah) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan sehingga hipotesis kedua diterima. Dengan demikian, penerapan SAP (Standar Akuntansi Pemerintah) oleh pegawai khususnya bagian pengelola keuangan akan mempengaruhi kinerja keuangan. Dimana laporan keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan Negara, dimana laporan keuangan tersebut disajikan berdasarkan implementasi SAP (Standar Akuntansi Pemerintah). Dengan adanya implementasi SAP, telah menjadikan laporan pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan negara menjadi semakin efisien transparan dan akuntabel, sehingga akan menciptakan kinerja keuangan yang baik. Dengan adanya pengaruh penerapan Standar Akuntansi Pemerintah terhadap kinerja keuangan maka diperlukan langkah-langkah khusus untuk meningkatkan implementasi SAP tersebut, diantaranya; melakukan Penyusunan dan penyajian laporan keuangan dengan menetapkan prinsip-prinsip yang diatur dalam Standar Akuntansi Pemerintah Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 2005, dengan menyusun dan menyajikan dengan basis kas untuk pengakuan pos-pos pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan serta basis akrual untuk pengakuan pos-pos asset dan kewajiban dan ekuitas, menyajikan laporan keuangan untuk tujuan umum dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan baik terhadap anggaran, antar periode maupun antar entitas, dan Laporan keuangan untuk tujuan umum dari unit pemerintah tetapkan dari entitas pelaporan disajikan secara terkonsolidasi menurut pernyataan SAP agar mencerminkan suatu kesatuan entitas.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Zeyn (2012), dimana Standar Akuntansi Pemerintah mengatur tentang penyajian laporan keuangan untuk tujuan umum dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan baik terhadap anggaran, antar periode maupun antar entitas, sehingga mengakibatkan pengaruh besar terhadap kinerja keuangan. Demikian juga pada penelitian Solikin (2010) yang menemukan bahwa penerapan akuntansi pemerintahan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kinerja keuangan. Selanjutnya penelitian Nugraheni (2008) menemukan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintah dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan. Sehingga dapat disimpulkan hal tersebut juga berdampak

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisa data yang diperoleh pada penelitian di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Provinsi Bengkulu, maka dapat ditarik kesimpulan: a. Partisipasi Pimpinan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat partisipasi pimpinan dalam Satuan Kerja Perangkat Daerah maka akan semakin tinggi pula tingkat kinerja keuangan. b. Implementasi SAP mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat penerapan SAP dalam menjalankan tugasnya maka semakin tinggi pula tingkat kinerja keuangan

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulah, Syukriy. (2011). *Penilaian Kinerja Keuangan Daerah*. <http://syukriy.wordpress.com/2011/11/29/penilaian-kinerja-keuangandaerah/>
- Anoraga, Panji. (2003). *Psikologi Dalam Perusahaan*. PT Rineka Cipta, Jakarta.
- Bastian, Indra. (2001). *Akuntansi Sektor Publik*. Penerbit BPFE. Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.
- Bastian, Indra. (2006). *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*. Erlangga. Jakarta
- Cahyono, Budi. (2005). Pengaruh Budaya Organisasi, Kepemimpinan dan Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Sumber Daya Manusia, di Sekretariat DPRD Propinsi Jawa Tengah, *JRBI. Volume 1, Nomor 1, hal 13-30*.
- Cooper Donald R. dan Pamela S. Schindler. (2003). *Business Research Method*. Eighth Edition. New York: McGraw Hill.
- Dimas, Agus. (2008). *Hubungan Kepemimpinan Partisipatif dengan motivasi kerja karyawan pada area pelayanan PT PLN (PERSERO) Distribusi Banten*. UIB Bandung.
- Dwijowijoto, R. N. (2003). *Kebijakan publik formulasi, implementasi dan evaluasi*, Jakarta : PT. elex media komputindo.
- Endang Wirjatmi. (2005). Pengukuran Kinerja Sektor Publik. *Jurnal Administrasi*. Vol.2 No.1. Bandung. STIA LAN. Bandung
- Ghozali, I. (2001). *Analisis Multivariate dengan program SPSS*. Edisi ke 2. Universitas Diponegoro
- Hermawan, Asep. (2005). *Penelitian Bisnis Paradigma Kuantitatif*. Jakarta. PT Grasindo
- Hair, J. F., et al. (2007). *Multivariate Data Analysis. 6th Edition*. New Jersey: Pearson Education Inc.
- Handoko, T. Hani. (1996). *Manajemen Perencanaan dan Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta : PT. BPFE.
- Hikmat, R. Harry dan Adimihardja, Kusnaka. (2003). *Participatory Research Appraisal: Pengabdian Dan Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung,
- Humaniora. Islamy, M. Irfan, (2001), *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Jarvenpa, L. Sirkka & Ives Blake. (1991). *Executive Involvement and Participation in the Management of Information Technology*.
- Jewell, L. N. & Siegall, M. (1998). *Psikologi Industri/Organisasi Modern: Psikologi Penerapan Untuk Memecahkan Berbagai Masalah Di Tempat Kerja, Perusahaan, Industri, Dan Organisasi*, ed-2, hal 529. Arcan. Jakarta
- Kaplan, Robert S, Norton, David P. (2001). *The Strategy Focused Organization, How Balanced Scorecard Company Thrive in The New Business Environment*, Harvard Business Press. Boston
- Kawedar, Warsito, Abdul Rohman, dan Sri Handayani. (2008). *Akuntansi Sektor Publik : Pendekatan Penganggaran Daerah dan Akuntansi Keuangan Daerah*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro : Semarang.
- Keputusan Lembaga Administrasi Negara. Nomo 239/IX/6/8/2003 Tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Akuntansi Pemerintah.
- Mahsun, M., (2006), *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*, BPFE Yogyakarta, Yogyakarta
- Mardiasmo. (2002). *Otonomi dan manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta. UPP. STIM. YKPN
- Mardiasmo. (2004). *Otonomi Dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta:
- Mardiasmo, (2006). Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik melalui Akuntansi Sektor Publik: Suatu Sarana Good Governance. *Jurnal Akuntansi Pemerintah, Vol.2 No.1 Mei 2006*
- Mardiasmo. (2009). *Perpajakan*. Edisi Revisi. CV Andi Offset. Yogyakarta
- Martini, Y dan Rostiana. (2003). Komitmen organisasi ditinjau berdasarkan iklim organisasi dan motivasi berprestasi. *Jurnal Phronesis. Vol. 5, No. 9, 21-31*.
- Mas'ud Fuad (2004). *Survey Diagnosis Organisasional (Konsep dan Aplikasi)* BP Universitas Diponegoro. Semarang
- Mazmanian, Daniel H., dan Paul A. Sabatier, (1983), *Implementation and Public Policy*, New York: HarperCollins.
- Miner, J.B. (1992). *Industrial-Organizational Psychology*. United States of America: McGraw-Hill.
- Moejiono, Imam. (2002). *Kepemimpinan dan Keorganisasian*. Jogakarta. UII Press
- Muhammad Gade. (2005). *Teori Akuntansi*. Edisi Pertama. Jakarta. Almahira
- Mulyadi. (2001), *Sistem Akuntansi, Edisi Ketiga, Cetakan Ketiga*, Penerbit Salemba. Empat, Jakarta
- Mulyanto. (2012) *Pengaruh kepemimpinan dan motivasi kerja terhadap Kinerja pegawai dengan kepuasan kerja sebagai Variabel moderating (studi kasus di dinas pertanian tanaman pangan Perkebunan dan kehutanan kabupaten karanganyar)*. STIE AUB SURAKARTA

- Muslim, Sabarudin. (2013). Pengukuran Kinerja Sektor Publik. Pusat Pengembangan Bahan Ajar Universitas Mercubuana. <https://docs.google.com>.
- Nimphar, Mutia. (2008). *Pengaruh Partisipasi Manajer Dalam Penganggaran Haji Medan Tahun. Tesis. USU.*
- Nugraheni, Purwaniati. (2008). *Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Jurnal. Pascasarjana Gunadarma.*
- Nugroho, D. Riant. Dr. (2008). *Publik Policy.* PT. Elex Media Komputindo. Jakarta.
- Nur Indriantoro, Supomo, B., (1999), *Metodologi Penelitian Bisnis*, Yogyakarta, BPFE-Yogyakarta.
- Parson, Wayne. (2006). *Public Policy: Pengantar dan Teori Praktik Analisis Kebijakan.*: Kencana Prenanda Media Group. Jakarta
- [Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005](#) tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
- Prasetya, Teguh Iman. (2008). *Partisipasi Rakyat Kuat di Akar Rumput “Studi Kritis Membangun Civil Society di Desa dan Kelurahan”*. Artikel <http://teguhimanprasetya.wordpress.com/2008/01>
- Randhita. Ricky. (2009). *Pengaruh Gaya Kepemimpinan Terhadap Kinerja Pegawai Dalam Organisasi Pemerintahan Kelurahan (Kasus Kelurahan Ciparigi, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor) Departemen Sains Komunikasi Dan Pengembangan Masyarakat Fakultas Ekologi Manusia.* Institut Pertanian Bogor
- Ratmono, Dwi, (2008) *Interaksi Informasi Akuntansi Dengan Faktor–Faktor Interpersonal Dalam Evaluasi Kinerja Subordinate.* MAKSI, UNDIP.
- Robbins, Stephen P. (2003). *Perilaku Organisasi.* Jakarta : PT. Indeks Kelompok GRAMEDIA
- Robbins SP, dan Judge. (2007). *Perilaku Organisasi*, Salemba Empat, Jakarta
- Rohman, Abdul (2007), *Pengaruh Peran Manajerial Pengelola Keuangan Daerah dan Fungsi Pemerintah Intern Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah.* *Jurnal Maksi Vol7 No.2 ISSN: 1412-6680*
- Siagian, Sondang P. (2003). *Teori dan Praktek Kepemimpinan* , PT. RINEKA CIPTA Jakarta.
- Sedarmayanti. (2003). *Dasar-dasar Pengetahuan tentang Manajemen Perkantoran.* Mandar Maju. Bandung
- Sekaran, U. (2007). *Research Methods For Business Metodologi Penelitian untuk Bisnis*, Buku 2, Edisi 5, Salemba Empat, Jakarta
- Setiawan, Guntur. (2004). *Implementasi Dalam Birokrasi Pembangunan.* Jakarta:Cipta Dunia.
- Srimindarti, C. (2004). *Balanced Scorecard Sebagai Alternatif Untuk Mengukur Kinerja*, (ON LINE), <http://puslit.petra.ac.id>, 12 Agustus 2007
- Soehardi, Sigit. (2003). *Prilaku Organisasional.* Yogyakarta.BPFE
- Solikin, Ikin. (2010). *Pengaruh Penerapan Akuntansi Pemerintahan, Kualitas Informasi Akuntansi Dan Kualitas Aparatur Pemerintahan Daerah Terhadap Good Government Governance Dan Implikasinya Terhadap Kinerja Keuangan (Survai Pada Pemerintah Kota Dan Kabupaten Di Provinsi Jawa Barat.* *Jurnal Disertasi. Universitas Pendidikan Indonesia. Bandung*
- Solikin, Akhmad (2006). *Penggabungan Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah:Perkembangan dan Permasalahan.* *Jurnal Akuntansi Pemerintah,Vol.2 No.2 Nopember 2006*
- Sopiah. (2008). *Perilaku Organisasi.* Andi. Yogyakarta
- Sugiyono. (2004). *Metode Penelitian Bisnis.* Bandung. Alfabeta
- Sugiyono. (2010). *Metode penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D.* Alfabeta. Bandung
- Supranto, J. (2000). *Statistik Teori dan Aplikasi.* Erlangga
- Tarigan, Antonius (2000). *Artikulasi Konsep Implementasi Kebijakan: Perspektif, Model, dan Kriteria Pengukurannya*
- Temaluru. J., (2001). *Kualitas SDM dari Perspektif IPO: Hubungan antara komitmen terhadap organisasi dan faktor-faktor demografis dengan kepuasan kerja karyawan.*: Pengembangan Bagian PIO Fakultas Psikologi UI. Jakarta
- Tjiptono, Fandy dan Santoso, Singgih, (2004). *Riset Pemasaran, Konsep dan Aplikasi dengan SPSS*, PT Elex Media Komputindo, Jakarta.

[Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003](#) tentang Keuangan Negara

Wahab, Abdul. (2006). *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.

Weston, Brigham. (2001). *Dasar-dasar manajemen keuangan 1*. Erlangga. Jakarta

Wibawa, Samudra, (1994). *Evaluasi Kebijakan Publik*. Jakarta : Raja Grafindo Persada,

Widodo, Joko, (2011). *Analisis Kebijakan Publik*: Bayumedia Publishing. Malang

Wirjatmi, Endang. (2005). Pengukuran Kinerja Di Sektor Publik. *Jurnal Ilmu Administrasi*. Vol.2.No.1.Bandung.STIA LAN Bandung.

Yousa, Amri. (2007). *Kebijakan Publik Teori dan Proses*. Laboratorium Pengkajian Penelitian dan Pengembangan Administrasi Negara. FISIP Universitas Padjajaran. Bandung